

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

WARTA

ISSN 2088-1975



9 772088 197569

#edisi 4. 2018

**MENUJU
POROS MARITIM
DUNIA**

WARTA WANTIMPRES

Warta WANTIMPRES adalah media publikasi dwi bulanan yang bertujuan untuk menyampaikan profil dan kegiatan Wantimpres kepada publik secara berkala.

Penanggung Jawab
M. Arfan Sahib Sali K.

Pimpinan Redaksi
M. Arfan Sahib Sali K.

Editor
Untung Widodo
Veri Nurhansyah T.

Penyusun
Andhi Ilham P.
Aris Munandar
B. Bonnik Manoe
D. Herdiyan
Dian Kartika Putri
Fikroh Amali F. A.
Syahlarriyadi

www.wantimpres.go.id

FOKUS



Agum Gumelar
Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden

"Harmonisasi Tata Kelola Kemaritiman Indonesia"

PERSPEKTIF



Suharso Monoarfa
Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden

"Kebijakan Perikanan Berbasis Bukti Ilmiah"



Jan Darmadi
Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden

"Kesejahteraan Nelayan Harus Meningkat"

DAFTAR ISI

01 FOKUS

02 PERSPEKTIF

06 GALERI KEGIATAN

Alamat Redaksi :

Jalan Veteran III No 2 Jakarta 10110
Telp.: (021) 3444801
Faks: (021) 3865092
email, veri.nurhansyah@setneg.go.id



Hak Cipta dilindungi Undang - Undang.
Dipersilahkan mengutip atau memperbanyak
sebagian majalah ini dengan seizin tertulis dari
penulis dan/atau penerbit.

Copyright © 2018

Foto Cover :



© Yudi Prilla (IG: @yudiaru)

© Witjaksana Darmosarkoro (Back Cover)



FOKUS

HARMONISASI TATA KELOLA KEMARITIMAN INDONESIA

Agum Gumelar
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Sudah lazim dipahami bahwa posisi geografis dan geopolitis Indonesia sangat strategis. Wilayah Indonesia membentang dari timur Samudera Hindia hingga barat Samudera Pasifik dengan luas perairan dan yurisdiksi laut mencapai 5,8 juta km2, atau sekitar 75% dari total luas wilayah nasional.

Pada satu sisi, posisi yang strategis tersebut merupakan sebuah anugerah dengan berbagai macam potensi untuk dikembangkan. Di sisi lain, strategisnya wilayah Indonesia juga menghadirkan tantangan berat terutama dalam upaya bangsa ini menegaskan kedaulatan dan menjaga keamanan dari berbagai ancaman di wilayah laut.

Bapak Agum Gumelar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengatakan, posisi strategis ini memang menjadikan Indonesia sebagai persinggungan berbagai kepentingan pihak/negara lain. Hal ini membuat ancaman terhadap pertahanan dan keamanan khususnya di wilayah perairan akan terus muncul sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi serta teknologi informasi dan komunikasi.

Kondisi tersebut sudah semestinya diantisipasi dengan tata kelola kemaritiman yang terintegrasi secara nasional. Sayangnya, tata kelola kemaritiman saat ini belum berjalan baik seperti

yang diamanatkan di dalam Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Keadaan ini disebabkan banyaknya instansi dan regulasi yang mengatur kewenangan di laut. Ada sekitar 13 instansi yang terlibat dalam pengelolaan kemaritiman dan kelautan di Indonesia, sehingga menyebabkan tata kelola kemaritiman tidak terpadu, bahkan saling tumpang tindih. "Keberadaan tidak kurang dari 1.283 unit kapal patroli dari berbagai jenis, tipe, dan ukuran belum dapat menciptakan keamanan di laut secara optimal," ungkap Bapak Agum Gumelar.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Bapak Agum Gumelar pernah menggelar Diskusi Terbatas pada 4 April 2018 lalu yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dalam tata kelola kemaritiman dan para akademisi. Dari kegiatan tersebut, para pihak menyepakati perlunya pembentukan *coast guard* yang mencakup seluruh unsur keamanan laut nasional. Unsur-unsur ini diharapkan melebur menjadi satu organisasi yang berciri "*Single Agency Multi-Tasks*". Guna mewujudkan hal tersebut, tentu perlu dilakukan harmonisasi (deregulasi) peraturan perundang-undangan yang mengatur semua sistem tata kelola dan kelembagaan di laut saat ini (FA, ARD, VNT).

Foto : Dokumen Pribadi

KEBIJAKAN PERIKANAN BERBASIS BUKTI ILMIAH

Suharso Monoarfa
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

“Bukti-bukti kebijakan akan terwujud jika dilakukan pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan”

Tantangan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan wilayah perairan terbesar di dunia, dalam mengatur kebijakan perikanan memang terbilang berat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dihadapkan pada tantangan berat terutama dalam memonitor maupun mendata permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan, maupun implementasi kebijakan di level masyarakat perikanan.

Kendati dihadapkan pada tantangan luasnya cakupan wilayah perairan nasional, Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengatakan, Indonesia secara bertahap harus mengembangkan data dan informasi yang sahih, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data dan informasi ini diperlukan sebagai sumber dalam merumuskan kebijakan perikanan nasional yang memang sudah seharusnya dilandaskan pada bukti-bukti ilmiah di lapangan (*evidence based policy*). “Bukti-bukti kebijakan akan terwujud jika dilakukan pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan,” ungkap Bapak Suharso dalam wawancara tertulis kepada Warta Wantimpres.

Kebijakan tersebut idealnya disusun secara holistik, mencakup kepentingan seluruh pemangku kepentingan industri, serta upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya hayati perikanan nasional. Dalam perikanan

tangkap misalnya, Bapak Suharso menjelaskan bahwa guna mencegah *overfishing*, perlu diberlakukan pengaturan penangkapan ikan yang lebih ketat, mencakup pengaturan jenis kapal dan alat tangkap, pengaturan waktu penangkapan dan jumlah ikan yang boleh ditangkap, serta pengaturan tentang pelaporan hasil tangkap.

Kunci dari efektivitas pengaturan tersebut berada pada kapasitas kelembagaan yang disertai tugas mengelola perikanan tangkap. Menurut Bapak Suharso, saat ini, wilayah perikanan tangkap sudah dibagi habis ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Masalahnya, WPP sekarang ini dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan provinsi, bukan lagi kewenangan pemerintahan kabupaten. Padahal, kemampuan pemerintah provinsi untuk mengelola wilayah perikanan di pesisir sangat terbatas, terutama pada provinsi yang memiliki wilayah perairan laut sangat luas.

Pengelolaan perikanan tangkap tentunya perlu diimbangi dengan perbaikan manajemen perikanan budidaya yang juga menjadi sumber dalam pemenuhan kebutuhan perikanan nasional. “Indonesia perlu mengembangkan teknologi budidaya modern sebagaimana teknologi budidaya ikan salmon di Norwegia yang mampu menghasilkan 1,1 juta ton ikan salmon per tahun,” kata Bapak Suharso.

Perbaikan dari sisi kebijakan dan manajemen pengelolaan tentunya perlu ditunjang dengan peningkatan infrastruktur fisik dan nonfisik perikanan (BBM, VNT).

foto : Bonnik

KESEJAHTERAAN NELAYAN HARUS MENINGKAT

“Kebijakan peningkatan kesejahteraan harus disesuaikan dengan karakteristik subbidang usaha nelayan”

Permasalahan minimnya kesejahteraan nelayan di Indonesia bukanlah hal baru yang muncul menjadi wacana publik. Meski pemerintah telah menelurkan berbagai macam kebijakan, kesejahteraan nelayan tidak kunjung terdongkrak sehingga daya tarik profesi ini terutama bagi generasi milenial sangat rendah.

Bapak Jan Darmadi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menilai kebijakan dan strategi peningkatan kesejahteraan nelayan mesti tepat sasaran, sesuai dengan subbidang usaha perikanan yang dilakukan. Permasalahan nelayan perairan darat (air tawar) misalnya, tentu berbeda dengan apa yang dihadapi oleh nelayan-nelayan yang melakukan usaha perikanan di laut.

Nelayan perikanan darat biasanya banyak menggantungkan hidupnya dengan memelihara ikan, seperti lele, nilai, dan mujair. “Masyarakat yang mencari penghidupan dari ikan air tawar pada umumnya belum memiliki pangsa pasar yang luas dan jelas,” kata Bapak Jan Darmadi.

Karakteristik dan masalah yang dihadapi nelayan perairan laut lebih beragam, terutama ditinjau dari jangkauan usaha penangkapan ikan yang dilakukan. Ada nelayan yang hanya menangkap ikan dengan cara serok di pantai dan banyak pula yang menangkap ikan di laut dekat. Tak hanya itu, banyak nelayan yang biasanya secara berkelompok menangkap ikan di laut dalam. “Masing-masing kelompok nelayan ini memiliki masalahnya sendiri sehingga cara penanganannya berbeda,” ujar Bapak Jan Darmadi.

Nelayan serok biasanya menghadapi masalah dalam hal manajemen stok mengingat ikan merupakan komoditas yang cepat busuk. Bapak Jan Darmadi menyarankan pemerintah agar membangun cold storage di setiap pelabuhan guna menyimpan hasil tangkapan ikan. Para nelayan akan dimudahkan mengatur stok sehingga tidak terpaksa menjual ikan karena takut busuk.

Sementara nelayan laut seringkali bergulat dengan musim tangkap yang fluktuatif. Saat ombak besar, mereka biasanya tidak dapat melaut sehingga tidak memiliki pemasukan. Untuk mengatasinya, pemerintah mesti membantu memperpendek jarak tangkap para nelayan. “Harus ada kapal induk sehingga para nelayan cukup menjual ikan di kapal induk tanpa harus kembali ke pantai yang jaraknya lebih jauh,” jelas Bapak Jan Darmadi (AM, VNT).



Jan Darmadi
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

foto : Veri



1



2



3



4



5



6



1. Bapak M. Yusuf Kartanegara, Anggota Wantimpres, memberikan cinderamata kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja beliau ke Provinsi Bengkulu pada 30 Juli s.d. 2 Agustus 2018.
2. Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, mengadakan pertemuan dengan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, di Kantor Wantimpres, pada Selasa, 31 Juli 2018. Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh para pejabat Sekretariat Wantimpres dan Kementerian Perhubungan.
3. Bapak Yahya Cholil Staquf, Anggota Wantimpres, menggelar Diskusi Terbatas tentang “Krisis Islamophobia di Eropa dan Peluang Indonesia dalam Berperan Mencari Jalan Keluarnya” di Kantor Wantimpres, pada Selasa, 31 Juli 2018. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah Holland C. Taylor, Direktur Bayt Ar-Rahmah, North Carolina, Amerika Serikat, serta Tom Dinham, Pakar Islam dan Timur Tengah.

4. Bapak Yahya Cholil Staquf, Anggota Wantimpres, melaksanakan Pertemuan Terbatas tentang “Reformasi Agraria Untuk Keadilan Sosial an Roadmap Penyelesaian Konflik Sumber Agrarian Kekinian” di Kantor Wantimpres, pada Rabu, 1 Agustus 2018.
5. Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Wantimpres, bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), menyelenggarakan Lokakarya tentang Pembangunan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Kamis, 2 Agustus 2018. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.
6. Bapak Abdul Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, meninjau Gedung Rektorat UIN Walisongo dalam kunjungan kerja ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 2 Agustus 2018.



7. Bapak Abdul Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, mengadakan pertemuan dengan Tim Inisiator Dewan Pendidikan, di Kantor Wantimpres, pada Selasa, 7 Agustus 2018
8. Bapak Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, memberikan Kuliah Umum tentang "Wawasan Kebangsaan" kepada sekitar 4.105 mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung Tahun Akademik 2018/2019 di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB Bandung, pada Selasa, 7 Agustus 2018.
9. Bapak M Yusuf Kartanegara, Anggota Wantimpres, menerima audiensi Fatayat Nahdlatul Ulama/Majlis Dzikir Hubbul Wathan (MDHW) Annisa di Kantor Wantimpres, pada Senin, 20 Agustus 2018. Dalam acara tersebut MDHW Annisa menyampaikan masukan mengenai penyebaran radikalisme yang sudah menyentuh hingga ke tingkat keluarga.

10. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, mengunjungi dan mencicipi kopi lokal racikan Otten Coffee Medan yang dimiliki oleh Jhoni Kusno. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja beliau ke Kota Medan, pada Senin, 24 Agustus 2018
11. Bapak IGK Manila, Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Jan Darmadi, bersama Ibu Mirna Annisa, Bupati Kendal, dan Bapak Fadholi, Anggota DPR-RI, menyaksikan pagelaran seni budaya kebangsaan usai berdialog dengan para petani tanaman pangan di Kabupaten Kendal, pada Selasa, 28 Agustus 2018.
12. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 31 Agustus 2018. Pada kegiatan tersebut, beliau meninjau Jogja Digital Valley (JDV) di kawasan Gondokusuman dan berdialog dengan pelaku ekonomi digital Qiscus.

WARTA Edisi 4 2018

